

## **Analisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Manajemen Hutan Lindung Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kehutanan Sosial (Studi Kasus Di Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut)**

**Yusya Muhamad Namara<sup>1</sup>, Mulyaningsih<sup>2</sup>, Aceng Ulumudin<sup>3</sup>**  
<sup>1, 2, 3</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

<sup>1</sup>24091120019@pasca.uniga.ac.id

<sup>2</sup>mulyaningsih\_02@uniga.ac.id

<sup>3</sup>aceng.ulumudin@uniga.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Manajemen Hutan Lindung Dalam Mewujudkan Efektivitas Hutan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan teknik survey. Responden sebanyak 89 orang adalah petani perhutanan sosial Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. Untuk menjawab hipotesis penelitian digunakan teknik analisis data, adapun analisis statistik yang digunakan yaitu model analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan-kebijakan perhutanan sosial memberikan pengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen hutan lindung dalam mewujudkan pencapaian efektivitas hutan sosial. Pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial berpengaruh terhadap manajemen hutan lindung. Manajemen hutan lindung berpengaruh terhadap efektivitas hutan sosial. Pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas hutan sosial

**Kata kunci:** Efektivitas Hutan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan sosial, Manajemen Hutan Lindung.

### **1. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara dengan luas hutan sebesar 884,850 juta hektare yang mana terluas kedua di dunia, namun pada saat ini kawasan hutan Indonesia luasnya berkurang bahkan tersisa sekitar 125,9 juta hektare atau seluas 63,7 persen dari luas daratan Indonesia (Menlhk.go.id, 2018). Hutan Indonesia biasanya disebut salah satu paru – paru dunia karena dapat menyumbangkan oksigen untuk membantu keberlangsungan manusia hidup (Wahyuni & Suranto, 2021). Dalam pengelolaan hutan Indonesia memiliki masalah yang kompleks karena tidak sesuai standar, salah satunya adalah masalah kemiskinan sekitar hutan (Dako, 2020), akibatnya masyarakat sekitar hutan melakukan perambahan hutan negara secara ilegal (*illegal logging*) (Surjono, 2020). Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya alih fungsi lahan untuk pertanian yang ada di Asia Tenggara sebanyak 1.307.317 kilometer persegi (Megarani, 2022).

Sedangkan laju deforetasi di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 115.459 hektare tercatat berkurang 346.998.7 dari tahun sebelumnya. Walaupun ada penurunan dalam laju deforetasi, akan tetapi laju deforetasi di Indonesia masih masuk daftar 10 terbesar di dunia pada tahun 2020

(Kusnandar, 2021). Dengan adanya hal tersebut, pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan mengelola sumber daya yang ada didalamnya.

Dalam pemberian hak mengimplementasikan program perhutanan sosial dengan alasan:

- a. Akses legal perhutanan sosial ini diberikan kepada masyarakat karena dari 25.856 desa yang ada disekitar hutan itu ternyata 37,6 persennya itu kategorinya miskin (Kementerian LHK, 2021). Kemudian ketahanan pangannya juga tidak terlalu tinggi padahal mereka dekat dengan sumber daya hutan.
- b. Akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan terbatas karena akses pengelolaannya telah dikelola oleh BUMN sehingga masyarakat terpaksa menggarap hutan secara ilegal, dan kemudian mereka di kriminalisasi.

Tujuan dari diadakannya program perhutanan sosial ini agar tidak lagi masyarakat yang dikriminalisasi, sehingga aksesnya itu benar benar legal dan dipercaya oleh negara dalam pengelolaan hutannya. Dengan demikian jika aksesnya telah dilegalkan tentu produktivitas masyarakat dalam mengelola hutan akan meningkat. Tenaga kerja juga akan terserap, jadi masyarakat yang tinggal di desa tidak lagi mencari kerja ke kota sehingga urbanisasi tidak terjadi. Bahkan kesenjangan kota dengan desa itu tidak terjadi dengan adanya program perhutanan sosial.

Dari pemaparan latar belakang diatas, sehingga dapat ditarik bahwa masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial belum optimal, yang diantaranya dalam pelaksanaan kebijakan belum disertai dengan sarana dan prasarana, serta dalam pelaksanaannya program perhutanan sosial hanya berhasil dalam aspek sosial dan ekonomi sedangkan dalam segi lingkungan masih terabaikan.
- b. Manajemen hutan lindung yang belum sempurna, diantaranya yaitu belum adanya perencanaan yang baik dalam pengelolaan hutan, belum optimal pengawasan dari aparatuer pemerintahan, ini dapat dilihat dari kerusakan hutan lindung yang tercatat sekitar 33%.
- c. Efektivitas pencapaian program kehutanan sosial yang belum efektif hal dapat dilihat dari belum berhasilnya kesejahteraan masyarakat juga berubahnya sikap masyarakat yang berpartisipasi dari semula merambah hutan dengan berbagai manifestasi ke sikap yang dapat memberikan kontribusi pada pelestarian hutan negara.

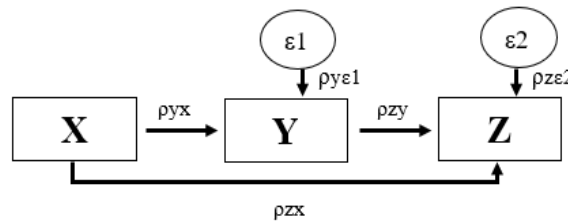
## 2. Metodologi

Metodologi yang digunakan peneliti yaitu metode eksplanasi dengan teknik evaluasi sedangkan untuk variabel bebas/indevident variabel (X) implementasi kebijakan perhutanan sosial, varibel antara/interventing variabel (Y) manajemen hutan lindung, variabel terikat/dependent varibel (Z) efektivitas pencapaian kehutanan sosial. Adapun sasaran populasi atau unit analisis pada penelitian ini merupakan para petani yang mendapatkan izin perhutanan sosial di Kecamatan Cisurupan sebanyak 213 orang dan dijadikan sampel sebanyak 89 orang.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil penelitian

Studi ini mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial terhadap manajemen hutan lindung melalui peningkatan efektivitas capaian perhutanan sosial. Model penelitian dapat ditunjukkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Paradigma Penelitian**

Pada tabel 1 menunjukkan hasil pengujian statistik yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Penghitungan Analisa Statistika**

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Determinan	Hubungan
X → Y → Z	0,9784	643,1232	3,1012	0,9573	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien jalur	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Determinan	Hubungan
X → Y	0,4176	5,0754	1,9879	0,2051	Signifikan
Y → Z	0,2891	4,008	1,9879	0,1827	Signifikan
X → Z	0,8217	7,5756	1,9879	0,8253	Signifikan

#### 3.2 Pembahasan

##### a. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Manajemen Hutan Lindung Dalam Mewujudkan Efektivitas Kehutanan Sosial

Terdapat dampak implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap manajemen hutan lindung dalam mewujudkan pencapaian efektivitas hutan sosial. Hal ini dibuktikan karena  $t_{hitung} = 64,31232 > t_{tabel} = 3,1012$  dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 95,73%, sementara itu sisanya 4,27 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa faktor Standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi pelaksana, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik menentukan manajemen hutan lindung yang akhirnya mempunyai dampak pada efektivitas hutan sosial. Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa pegawai Dinas Kehutanan telah merealisasikan kebijakan perhutanan sosial sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Standar dan sasaran kebijakan digunakan supaya pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial sesuai dengan kaidah – kaidah yang berlaku.

Efektivitas program dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti selain dari variabel pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial dan manajemen hutan lindung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak diteliti yaitu sebesar 4,27 %. Epsilon yang diduga besar memberikan pengaruh efektivitas program hutan sosial adalah kepemimpinan. Hal ini sebagaimana sejalan dengan Mulyaningsih (2020) yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam proses pengembangan karena pemimpin sebagai pemegang kendali kebijakan.

#### **b. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Manajemen Hutan Lindung**

Ditinjau dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat keputusan  $H_0$  ditolak, hal itu dapat dilihat dari besarnya  $t_{hitung}$  dari pada  $t_{tabel}$  dimana  $t_{hitung} = 5,0754 > t_{tabel} = 1,9879$ . Artinya terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial terhadap manajemen hutan lindung. Besarnya pengaruh kebijakan perhutanan sosial terhadap manajemen hutan lindung dengan nilai 0,2052 atau sebesar 20,52%, sedangkan sisanya sebesar 79,48 diberikan pengaruh oleh variabel lain diluar implementasi kebijakan yang tidak termasuk dalam model (epsilon).

Pada dasarnya implementasi kebijakan dimana dimensi Standar dan sasaran kebijakan, Karakteristik, Sumber Daya, juga Organisasi Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi pelaksana, Sikap atau disposisi Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik saling berkesinambungan satu dengan lainnya dalam proses implementasi kebijakan, dimana ketika satu dimensi terganggu maka proses dari implementasi kebijakan pun tidak akan berjalan dengan optimal. Seperti yang telah diutarakan diatas yaitu dampak implementasi kebijakan terhadap manajemen adalah sebesar 20,52% dan hal itu adalah dampak yang tidak kecil sehingga proses implementasi kebijakan harus terus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya supaya manajemen hutan lindung bisa dilaksanakan dengan baik.

#### **c. Pengaruh Manajemen Hutan Lindung Terhadap Efektivitas Kehutanan Sosial**

Dari hasil analisis data didapatkan keputusan  $H_0$  ditolak, hal itu dapat dilihat dari besarnya  $t_{hitung}$  dari pada  $t_{tabel}$  dimana  $t_{hitung} = 4,008 > t_{tabel} = 1,9879$ . Artinya terdapat pengaruh manajemen hutan lindung terhadap efektivitas hutan sosial. Besarnya dampak variabel manajemen hutan lindung terhadap efektivitas hutan sosial secara langsung ialah memiliki besar 18,27% sedangkan sisanya memiliki besar 81,73% diberikan dampak oleh variabel lain diluar variabel manajemen hutan lindung yang tidak masuk didalam model. Hasil pengujian diatas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengkoordinasian menjadi faktor penguat dalam mewujudkan efektivitas hutan sosial, sehingga pengaruh secara langsung variabel manajemen hutan lindung terhadap efektivitas hutan sosial relatif signifikan.

Selain variabel manajemen hutan lindung, efektivitas juga dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 81,73%. Variabel epsilon yang diduga mempengaruhi yaitu Evaluasi. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan evaluasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas. Evaluasi kebijakan perhutanan sosial memungkinkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Provinsi Jawa Barat untuk memantau pelaksanaan kebijakan, mengukur hasil, dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Dari pemantauan tersebut akan diperoleh data – data yang dapat membantu dalam menilai kinerja, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas. Hal ini senada dengan pernyataan dari Wahid & Ulumudin, (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas digunakan dalam evaluasi untuk mengukur seberapa baik pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan.

#### **d. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Efektivitas Kehutanan Sosial**

Dari hasil analisis data didapatkan keputusan  $H_0$  ditolak, hal itu dapat dilihat dari besarnya  $t_{hitung}$  dari pada  $t_{tabel}$  dimana  $t_{hitung} = 7,5756 > t_{tabel} = 1,9879$ . Artinya terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap efektivitas kehutanan sosial. Besarnya dampak variabel pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial pada efektivitas kehutanan sosial sebesar 67,51%, sedangkan pengaruh tidak langsung kebijakan perhutanan sosial sebesar 15,02%. Berdasarkan pengujian didapatkan jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung pada variabel pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial terhadap efektivitas kehutanan sosial sebesar 82,53%, sedangkan sisanya sebesar 17,47% dipengaruhi oleh (epsilon) variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

Selain pengaruh implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap efektivitas hutan sosial, efektivitas juga diberikan pengaruh oleh variabel lain. Diduga pengaruh dari variabel yang tidak diteliti oleh peneliti yaitu kolaborasi. Dalam Istika (2022) menyatakan bahwa dengan kolaborasi dimungkinkan dapat dengan efektif meringankan beban pekerjaan dengan membagi-bagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini juga senada dengan pernyataan dari Pak Rana bahwa kebijakan perhutanan sosial ini merupakan program kolaborasi dari beberapa instansi seperti Dinas Pertanian, Dinas UMKM dan stakeholder yang lainnya.

#### **4. Kesimpulan**

Dilihat dari hasil penelitian dan apa yang telah dibahas, sehingga ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh signifikan antara pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial terhadap manajemen hutan lindung.
- b. Terdapat pengaruh signifikan antara manajemen hutan lindung terhadap pencapaian efektivitas hutan sosial.
- c. Terdapat pengaruh signifikan antara pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial terhadap pencapaian efektivitas hutan sosial.

Hal ini menunjukkan jika hipotesis nihil ada penolakan, berarti pengaruh pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial relatif besar. Adapula pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap manajemen hutan lindung dalam mewujudkan pencapaian efektivitas hutan sosial memberikan pengaruh nyata dan positif. Disamping hasil pengujian, terdapat pula temuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pada variabel pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial terdapat temuan yaitu:
  - 1) Para petani perhutanan sosial belum memahami dengan baik isi kebijakan perhutanan sosial.
  - 2) Para petani perhutanan sosial belum sepenuhnya dapat melaksanakan isi kebijakan publik tentang perhutanan sosial.
  - 3) Pemerintah melaksanakan kebijakan perhutanan sosial belum disertai dengan akses sarana dan prasarana yang memadai.

- b. Pada variabel manajemen hutan lindung terdapat temuan-temuan yaitu:
- 1) Masih ada sebagian masyarakat yang melanggar kaidah penanaman pada hutan lindung.
  - 2) Masih terdapat masyarakat yang sengaja menebang pohon dengan alasan menutupi tanaman.
  - 3) Kaidah penanaman belum sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.
- c. Pada variabel efektivitas pencapaian kebijakan hutan sosial terdapat temuan yaitu:
- 1) Pemerintah belum memberikan kemudahan akses terhadap petani untuk memperoleh permodalan.
  - 2) Masih terdapat sanksi yang belum diterapkan dengan baik terhadap masyarakat yang melanggar kaidah – kaidah konservasi.

## Daftar Pustaka

- Akhmad, B. (2022). Buku Komunikasi Organisasi (Octavianor, Ed.; I). Aswaja Pressindo.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Badan Pusat Statistik*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-didalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2020-ha-th-.html>
- Budi, B., Kartodihardjo, H., & Nugroho, B. (2021). Implementation of Social Forestry Policy: Analysis
- Mulyaningsih. (2020b). *Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan*. Kimfa Mandiri.
- Natasadana, W. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Pada Program Perhutanan Sosial Secara Lestari di Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut*. Universitas Garut.
- Open Data Jabar. (2022). *Luas Hutan Rakyat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Opendata.Jabarprov.Go.Id. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/luas-hutan-rakyat-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Pambudi, A. S. (2020). The Development of Social Forestry in Indonesia: Policy Implementation Review, 2007-2019. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. (n.d.). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- Prayogo, Fauzi, H., & Naemah, D. (2020). Analisis Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Dalam Penerapan Pola Agroforestri Pada Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut). *Jurnal Sylva Scientiae*, 03(4), 709–719. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jss/article/download/2354/1915>
- Rahayu, E., & Triwanto. (2021). Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *Budimas*, 03(02), 545–549.
- Rizaldi, A., Arief, D., Kaskoyo, H., & Setiawan, A. (2022). Pemanfaatan Google Earth Engine Untuk Pemantauan Lahan Agroforestri Dalam Skema Perhutanan Sosial. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/mgi.73923>
- Rudiawan, I. (2019). *Perhutani Klaim 33 Persen Lahan Hutan Kritis Berfungsi Sebagai Resapan Air - Lingkungan Hidup* /. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/1399-lingkungan-hidup/647646/perhutani-klaim-33-persen-lahan-hutan-kritis-berfungsi-sebagai-resapan-air>

- Rujehan. (2021). *Pengantar Manajemen Hutan dan Telaah Ekonomi* (I). Universitas Mulawarman.
- Surjono, G. (2020). Kehutanan Sosial Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Miskin Pedesaan. *Jurnal Sosial*, 44(3), 211–224. <https://ejournal.kemosos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2190/pdf>
- Sutiawan, I., & Mulyaningsih. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kinerja Bisnis Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 12(2), 18–26. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v12i2.4>
- Ulumudin, A., & Khaerani, T. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Manajemen Penagihan Pajak untuk Mewujudkan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah dalam Sektor Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 13(1).
- Wahid, & Ulumudin, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Dinas Sosial Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 16(01), 111–118. <file:///C:/Users/AsusS/Downloads/168-Article%20Text-1194-2-10-20230409.pdf>
- Wahyuni, H., & Suranto. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 149–162. <https://doi.org/10.14710>
- Zulkarnain, A. (2021). Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 171–187. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.822>